

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara offline di PT. Meprofarm pada tanggal 08 Januari - 29 Februari 2024 dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan pemahaman bagi calon Apoteker terkait peran, fungsi dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Apoteker di industri farmasi.
2. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan wadah kepada calon Apoteker agar dapat menambah pengalaman, wawasan, keterampilan dan pengetahuan terkait pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan gambaran kepada calon Apoteker terkait alur awal proses pembuatan formula, pengadaan awal bahan baku (bahan awal dan bahan pengemas), proses produksi, pengemasan, pengawasan mutu, pemastian mutu sampai proses pendistribusian produk.
4. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan gambaran kepada calon Apoteker terkait permasalahan yang dapat terjadi di industri farmasi.
5. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat membantu dalam mempersiapkan calon Apoteker untuk nantinya dapat menjadi Apoteker yang professional dan kompeten.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara offline di PT. Meprofarm pada 08 Januari - 29 Februari 2024 yaitu:

1. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan PT. Meprofarm hendaknya dapat terus melakukan kerjasama yang baik karena dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini kami mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari seluruh departemen yang ada di PT. Meprofarm.
2. Diharapkan sebelum dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) mahasiswa calon Apoteker dapat membekali diri terkait peran dan tanggung jawab bagian-bagian yang ada di industri farmasi dengan membaca pedoman CPOB.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
- Departemen Kesehatan RI, Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2021, Buku Analisis Pembangunan Industri Edisi II.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Jakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, Jakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, Jakarta